

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBANGUNAN DEMOKRASI DESA
(STUDI DI DESA SIRAMBAS KECAMATAN PANYABUNGAN
BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Oleh:
UMMI NATIJAH
NIM : 15042021**

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Pembangunan Demokrasi Desa (Studi di Desa
Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten
Mandailing Natal)

Nama : Ummi Natijah

NIM/TM : 15042021/2015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

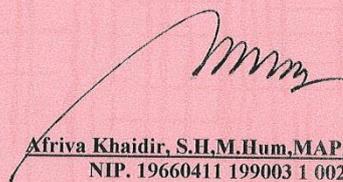
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Oktober 2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing


Afriva Khaidir, S.H.M.Hum.MAPA,Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

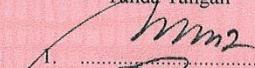
Pada hari Jum'at, Tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB

**Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan
Demokrasi Desa (Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan
Barat Kabupaten Mandailing Natal)**

Nama : Ummi Natijah
NIM : 15042021
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Oktober 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Afriva Khaidir S.H,M.Hum,MAPA,Ph.D	1. 
2. Anggota : Aldri Frinaldi,S.H.,M.Hum.,Ph.D	2. 
3. Anggota : Nora Eka Putri.,S.IP.,M.Si.	3. 

**Mengesahkan
Dekan FIS UNP**



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218198403 2001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummi Natijah
NIM/TM : 15042021
Tempat / Tanggal Lahir : Sirambas / 04 Oktober 1996
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul berjudul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Demokrasi Desa (Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 1 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



Ummi Natijah

15042021/2015

ABSTRAK

UMMI NATIJAH (2015/15042021) : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Demokrasi Desa (Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan demokrasi di Desa Sirambas Kecamatan panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilakukan karena BPD belum maksimal dalam menjalankan perannya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi masing kurang, kurangnya keaktifan masyarakat dikarenakan sebagian besar masyarakat di Desa Sirambas belum ada yang tahu apa fungsi dan peran dari BPD. Alat analisis yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan informan penelitian yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, tokoh-tokoh masyarakat, serta masyarakat. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa pelaksanaan fungsinya sebagai membahas dan merancang peraturan desa, BPD di Desa Sirambas masih kurang baik. Ini terbukti bahwa BPD tidak menggunakan kantor yang sudah ada untuk membahas peraturan desa, tetapi BPD malah melakukan musyawarah tentang peraturan desa di tempat yang tidak semestinya. Penelitian ini diharapkan agar mampu menjadi bahan masukan dan acuan bagi peneliti dan BPD dapat lebih memahami perannya agar tercapinya suatu tujuan.

Kata Kunci : Demokrasi, Pembangunan Desa, Badan Permusyawaratan Desa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Demokrasi Desa (Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)”**

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku dosen pembimbing sekaligus Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum, Ph.D selaku dosen penguji I.
5. Bapak Nora Eka Putri S.IP., M.Si selaku dosen penguji II.

6. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada jurusan Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
7. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Husin Batubara selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
9. Bapak Martaon selaku Sekretaris Desa yang telah berjasa memberikan izin pengumpulan data sekaligus pengisian data penelitian ini.
10. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Bapak Ramlan Nasution dan Ibunda tersayang Siti Asibah yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna. Dengan do'a, semangat dan dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Teruntuk Saudara saya Ummi Nathara (kakak), Awaluddin (abang), Ummi Syari'ah (adik) yang selalu memberikan semangat kepada saya. Serta seluruh keluarga yang selalu memotivasisaya untuk lebih baik.
12. Terima kasihkepada sahabat dan teman-teman saya (Felicya, Nurhamidah, Upeng, Maya, Indah, Ella, Faizal) yang membantu, memotivasi, serta semangat kepadapenulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi

ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Oktober 2019
Penulis

UMMI NATIJAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	10
A. Kajian Teori	10
1. Konsep Demokrasi di Desa.....	10
a. Pengertian Demokrasi	10
b. Pembangunan Desa	13
2. Konsep Organisasi	14
a. Pengertian Organisasi	14
b. Unsur-unsur Organisasi	15
c. Tujuan Organisasi	16
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	17
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Informan Penelitian	24
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	25
E. Uji Keabsahan Data	29
F. Teknik Analisa Data	30

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
1. Temuan Umum	32
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
b. Struktur Demokrafis	32
c. Letak dan Luas Desa Sirambas	33
d. Keadaan Sosial Desa Sirambas	34
e. Keagamaan	36
f. Sarana Ibadah	37
g. Pendidikan	38
h. Sumber Daya Alam	39
i. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organusasi BPD di Desa Sirambas	40
j. Sumber Daya Pembangunan	41
k. Sumber Daya Sosial Desa	43
l. Kondisi Ekonomi	43
2. Temuan Khusus Penelitian	44
a. Fungsi BPD di Desa Sirambas	44
b. Peran BPD dalam pembangunan demokrasi di Desa Sirambas.....	53
c. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan di Desa Sirambas	60
3. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Informan Penelitian	25
Tabel 4.1 Nama Desa di Kecamatan Panyabungan Barat Kab. Madina	33
Tabel 4.2 Jumlah mata pencaharian penduduk Desa Sirambas	34
Tabel 4.3 Laporan Kependudukan Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.....	35
Tabel 4.4 Agama dan Penganut di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat	37
Tabel 4.5 Sarana ibadah di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat	37
Tabel 4.6 Tingkat pendidikan penduduk di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat	39
Tabel 4.7 Daftar Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat	42
Tabel 4.8 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya yang ada di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat	43
Tabel 4.9 Isi Peraturan Desa di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat	50
Tabel 4.10 Hasil Musrenbang di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	23
Gambar 4.1 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sirambas ...	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi telah berlangsung dan mengeluarkan produk penting seperti otonomi daerah yang sebenarnya merupakan perwujudan dari demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, transparansi, dan efisien, juga mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Otonomi daerah juga merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreatifitasnya. Dengan semakin berdayanya politik maka secara otomatis akan dapat menjamin pula keikutsertaan yang lebih luas bagi komponen-komponen masyarakat guna mewujudkan arahan demokratisasinya. Tujuan otonomi daerah yaitu sebagai proses pemberdayaan kepada daerah dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembuatan keputusan serta implementasinya, membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah dengan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan

bahwa :

“Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam rangka melakukan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur maupun mengurus kepentingan masyarakat di desa, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan suatu lembaga yang mem Perwakilan masyarakat di desa, dan suatu mitra kerja pemerintah baik di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, maupun pembangunan yang berguna sebagai badan legislasi, pengawasan, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di suatu desa tersebut.

Anggota dari BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah tersebut. Anggota BPD yaitu terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, pemuka agama, golongan profesi, dan juga termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda masyarakat lainnya. Oleh karena itu penguatan BPD merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan demokratis dan diharapkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kehadiran demokrasi lokal diharapkan mampu memberikan respon terhadap kebutuhan gerak demokratisasi, dengan membuka ruang bagi masyarakat

untuk memberikan partisipasi dalam proses pembangunan di desanya. Demikian pula dengan BPD sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa, dan lembaga yang memiliki posisi strategis sebagai wahana demokrasi desa.

BPD menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan yang dilaksanakan disuatu desa tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya BPD tidak terlepas dari aspirasi dan partisipasi dari masyarakat di desa. Keikutsertaan masyarakat tersebut merupakan wujud partisipasi dan sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan di desanya.

Disinilah kemampuan anggota BPD sangat diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan pemerintah desa berjalan dengan baik apabila pihak anggota terjadi kerjasama antara aparat Desa dengan BPD. Oleh karena itu lahirnya BPD hendaknya memberikan harapan-harapan baru bagi demokrasi desa, sebagaimana fungsi yang dimiliki BPD hendaknya diarahkan pada upaya terselenggaranya pemerintahan desa yang berkualitas, transparan, dinamis, baik serta bersih, dan mampu memberikan perubahan bagi terciptanya suatu pemerintahan desa yang baik.

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat-perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 61, BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berfungsi

melaksanakan pengawasan terhadap suatu proses pemerintahan desa, dan menerapkan peraturan desa bersama Kepala Desa untuk menyalurkan dan merangkul aspirasi dari masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat 1 bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintahan desa melibatkan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada hakekatnya pembangunan desa menggunakan suatu prinsip dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi ini dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan desa. Jadi partisipasi dari masyarakatnya sangat membantu Desa kearah yang lebih baik dengan arahan dari pemerintahan desa yang akan sangat berdampak positif terhadap pembangunan Desa

Desa Sirambas adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peran BPD sangat dituntut oleh masyarakat maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD diharapkan mampu membawa efek positif bagi masyarakat baik dalam segi pembangunan. Selain itu BPD harus mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sirambas, Bapak Husin Batubara pada tanggal 18 Januari 2019 dalam kutipan wawancara beliau menyebutkan :

“Ngon proses aspirasi na ilehen masyarakat nitaon, memang hami pihak BPD inda manyapai satu-persatu anggota masyarakat. Hami mangalehen waktu tu tokok-tokok masyarakat untuk mayapai masyarakat on snga aha do na porlu diperbaiki ataupe masalah pembangunan di Desa nitaon. Baru ami musyawarahkon melalui Musrenbang golarna ataupe (Musyawarah Rencana Pembangunan)”

(Dalam proses aspirasi yang diberikan masyarakat, memang kami pihak BPD tidak bertanya satu-persatu anggota masyarakat. Kami memberikan waktu kepala tokok-tokok masyarakat untuk bertanya kepada masyarakat apakah ada yang perlu diperbaiki ataupun masalah pembangunan yang ada di Desa kita. Baru kami akan musyawarahkan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).

Penulis melakukan wawancara awal terhadap salah satu tokok masyarakat di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Bapak Lagut pada tanggal 28 Januari 2019 dalam wawancara awal Bapak Lagut mengatakan :

“Menurut ni Udak (Paman) BPD di Desa nitaon urang dope nida aktifna, arana satiop mangadaon Musreimbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) anggota ni BPD on sajo sering do inda hadir ataupe alai sering dei absen”

(Menurut ni Paman BPD di Desa kita masih kurang aktif, karna setiap mengadakan Musreimbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) anggota dari BPD sering tidak hadir atau absen)

Sedangkan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu masyarakat di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Bapak Hamdan Nasution pada tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan :

“Memang disaat Musreimbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) BPD manarimo saran ataupe aspirasi ni

masyarakat on, tapi BPD urang cepat manangani aspirasi na hami lehen, alai manunda-nunda dohot bahat ma alasan-alasan na timbul”

(Memang pada saat Musrebang BPD menerima saran ataupun aspirasi dari masyarakat, tetapi BPD kurang cepat menangani aspirasi yang kami berikan, mereka menunda-nunda dan timbul berbagai alasan)

Penulis masih melihat ada beberapa permasalahan yang ditemukan dilapangan saat dilihat kenyataan yang terjadi di Desa Sirambas, bahwa BPD belum maksimal dalam menjalankan perannya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi masing kurang.

Hal ini terbukti *pertama*, kurangnya keaktifan masyarakat dikarenakan sebagian besar masyarakat di Desa Sirambas belum ada yang tahu apa tugas dan peran dari BPD. *Kedua*, lemahnya BPD dalam mengawasi anggotanya untuk siap melayani masyarakat. *Ketiga*, kurangnya komunikasi antara pihak anggota BPD dengan masyarakat di Desa Sirambas. *Keempat*, anggota dari BPD sendiri kurang mempunyai wawasan tentang pemerintahan desa sehingga apa yang seharusnya dilakukan oleh BPD belum diterapkan sebagaimana yang harus dilakukan oleh BPD. *Kelima*, anggota BPD masih sibuk diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD.

Melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Demokrasi Desa (Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas selanjutnya penulis akan mencoba mengidentifikasi masalah yang terjadi, sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum maksimal dalam menjalankan perannya
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi
3. Kurangnya keaktifan dari masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sirambas
4. Sebagian besar masyarakat di Desa Sirambas belum ada yang tahu apa tugas dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
5. Masih lemahnya komunikasi antara pihak anggota BPD dengan masyarakat di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal
6. Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri kurang mempunyai wawasan tentang pemerintahan desa
7. Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD

C. Batasan Masalah

Penulis memfokuskan penelitian terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan demokrasi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah diatas dan juga mengingat pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

demokrasi pembangunan di Desa maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fungsi BPD di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana peran BPD dalam pembangunan demokrasi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang ditemukan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui bagaimana peran BPD dalam pembangunan demokrasi di desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembangunan di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

Salah satu pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh

besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara dan sebagai bahan kepustakaan khususnya tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Secara praktis

a. Bagi instansi terkait

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah khususnya lembaga BPD di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terhadap penyimpangan yang terjadi, serta dijadikan panduan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana seharusnya pemerintah khususnya pemerintah Desa dalam melaksanakan perannya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

c. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana menambah wawasan penulis dan pemenuhan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana administrasi publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.